



**Kantor Wilayah Kemenkumham Padang
Setjen**

(408798)

**Untuk Periode yang Berakhir
Tanggal 31 Desember 2023**

AUDITED

Jl. S.Parman No. 256 - Padang 25133

Sumatera Barat

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Padang, Januari 2024
Kepala Kantor Wilayah,

Hatis Sukanto
NIP. 19660605 198911 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	17
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	23
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	31
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	36
Pengungkapan Penting Lainnya	38
Lampiran dan Daftar	

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA
BARAT**

***JL. S. PARMAN NO. 256 PADANG - SUMATERA BARAT 25133
TELEPON 0751 7055471, FAXIMILE 0751 7055510***

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat tingkat wilayah selaku UAPPA-W yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2023 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internyang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Padang, 4 Januari 2024
Kepala Kantor Wilayah



Hari Sukanto
NIP. 19660605 198911 1 001

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat Periode 31 Desember 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp21.110.627 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara pada 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp22.090.007.028 atau mencapai 99,56 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp22.186.820.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023. Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp107.702.198,236 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp20.347.808 dan Aset Tetap (neto) sebesar Rp107.681.850.428.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0 dan Rp107.702.198.236.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp15.739.741 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp20.900.905.263 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp20.885.165.522). Defisit Kegiatan Non Operasional masing-masing sebesar Rp4.920.886 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp20.880.244.636).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada

tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp105.324.816.833 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp20.880.244.636 ditambah Koreksi yang menambah ekuitas sebesar Rp3.547.500 ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp23.254.078.539 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp107.702.198.236.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 31 Desember 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA BARAT
SEKRETARIAT JENDERAL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

(Dalam Rupiah)



Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA BARAT NERACA PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
ASET			
ASET LANCAR			
Persediaan	C.1	20,347,808	43,646,964
Jumlah Aset Lancar		20,347,808	43,646,964
ASET TETAP			
Tanah	C.2	84,712,482,000	84,712,482,000
Peralatan dan Mesin	C.3	12,684,489,226	10,494,079,704
Gedung dan Bangunan	C.4	21,882,633,635	19,934,042,000
Aset Tetap Lainnya	C.5	139,012,928	135,012,928
Konstruksi dalam pengerjaan	C.6	2,810,836,950	2,810,836,950
AKUMULASI PENYUSUTAN		(14,547,604,311)	(12,775,091,665)
Jumlah Aset Tetap		107,681,850,428	105,311,361,917
ASET LAINNYA			
Aset Lain-Lain	C.7	887,749,700	140,903,000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.8	(887,749,700)	(140,453,000)
Jumlah Aset Lainnya		-	450,000
JUMLAH ASET		107,702,198,236	105,355,458,881
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.9	0	30,642,048
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.10	0	-
Uang Muka dari KPPN	C.11	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.12	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	30,642,048
JUMLAH KEWAJIBAN		-	30,642,048
EKUITAS			
Ekuitas	C.13	107,702,198,236	105,324,816,833
JUMLAH EKUITAS		107,702,198,236	105,324,816,833
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		107,702,198,236	105,355,458,881

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA BARAT
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Ne gara Bukan Pajak	D.1	15,739,741	10,997,040
JUM LAH PENDAPATAN		15,739,741	10,997,040
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	12,177,398,518	11,465,225,921
Beban Persediaan	D.3	76,302,456	111,972,390
Beban Barang dan Jasa	D.4	4,219,779,816	3,819,092,592
Beban Pemeliharaan	D.5	1,156,266,980	850,830,692
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1,970,443,281	1,543,548,532
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	1,300,714,212	1,044,630,259
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8	-	-
JUM LAH BEBAN		20,900,905,263	18,835,300,386
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(20,885,165,522)	(18,824,303,346)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.9		
Surplus Pelepasan Aset Nonlancar		4,550,138	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional		370,748	150
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		370,748	150
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		4,920,886	150
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(20,880,244,636)	(18,824,303,196)
SURPLUS/DEFISIT LO		(20,880,244,636)	(18,824,303,196)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA BARAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	E.1	105,324,816,833	44,808,071,857
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(20,880,244,636)	(18,824,303,196)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	3,547,500	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	3,547,500	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
JUMLAH		3,547,500	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	23,254,078,539	79,371,690,220
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		3,084,434,622	60,547,387,024
EKUITAS AKHIR	E.5	107,702,198,236	105,355,458,881

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Entitas berkedudukan di Jalan S. Parman No. 256 UlakKarang Padang.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat berkomitmen dengan visi ***“Mewujudkan Masyarakat Sumatera Barat yang Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia.”***

Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Terwujudnya politik legislasi yang berkualitas melalui pembentukan peraturan perundangan yang terencana;
- Terwujudnya Layanan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang cepat dan murah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- Terwujudnya penegakan hukum yang berkualitas di bidang Keimigrasian, Hak Kekayaan intelektual, kerja sama timbal balik dengan Negara lain, Pembinaan Pemasarakatan serta efektifitas koordinasi antar instansi penegak hukum;

- Terwujudnya kebijakan nasional yang mendorong penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia;
- Terwujudnya manajemen organisasi yang akuntabel dengan penyelenggaraan birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang professional;
- Terwujudnya aparat Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan berintegritas.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat. Laporan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat periode Desember 2023 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah satuan kerja di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat adalah 1 satuan kerja.

Rincian satuan kerja tersebut tersaji sebagai berikut:

Rekapitulasi Jumlah Satker UAPPA-W

No	Kode Wil	Satker	Jumlah/Jenis Kewenangan				Jumlah Satker
			KP	KD	DK	TP	
1	0800	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Padang (408798)	-	1	-	-	1

Jumlah	-	1	-	-	1
---------------	---	----------	---	---	----------

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan periode 31 Desember 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan

- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan

fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan	10%

	Pertama tidak dilakukan pelunasan	
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh

lima juta rupiah);

c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap

semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan

*Piutang
Jangka
Panjang*

AsetLainnya

dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban

jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, *Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat* telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak sembilan kali dari DIPA awal, pagu awal sebesar Rp17.496.194.000 setelah revisi terakhir menjadi Rp22.186.820.000. Sehingga pagu

anggaran terlihat sebagai berikut:

Uraian	31 DESEMBER 2023	
	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0
Jumlah Pendapatan	0	0
Belanja		
Belanja Pegawai	10,765,198,000	12,224,466,000
Belanja Barang	6,197,041,000	7,464,262,000
Belanja Modal	533,955,000	2,498,092,000
Jumlah Belanja	17,496,194,000	22,186,820,000

Revisi yang dilakukan merupakan revisi penambahan sewa kendaraan pejabat dan operasional, revisi penyesuaian halaman III DIPA, revisi Anggaran Biaya Tambahan Belanja Modal Gedung dan Bangunan, revisi Pagu Minus Belanja Pegawai, revisi Anggaran Biaya Tambahan Pengadaan CASN Tahun Anggaran 2023, revisi pagu minus belanja operasional dan revisi POK dalam satu KRO.

B.1 Pendapatan

*Realisasi
Pendapatan
Rp21.110.627*

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp21.110.627 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat terdiri dari Pendapatan dari pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan, Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah, Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya dan penerimaan kembali belanja pegawai dari tahun anggaran yang lalu dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	31 DESEMBER 2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	5,000,138	0.00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan		15,122,586	
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah		617,155	
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	370,748	0.00
Jumlah	-	21,110,627	0.00

Realisasi Pendapatan pada 31 Desember 20223 mengalami penurunan sebesar 91,96% dibandingkan pada 31 Desember 2022. Realisasi Pendapatan mengalami kenaikan dari sebesar Rp.10.997.190 menjadi Rp21.110.627 dikarenakan realisasi pendapatan pada periode ini berasal dari pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan berupa sewa rumah dinas, pendapatan dari pemindahan BMN Lainnya, Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah dan penerimaan kembali Belanja pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu berupa pengembalian kelebihan pembayaran tunjangan pegawai yang naik pangkat/JFT.

*Perbandingan Realisasi Pendapatan
Periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2023	REALISASI 31 DESEMBER 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	5,000,138	-	0.00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	15,122,586	10,997,040	37.52
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	617,155	-	
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	370,748	150	0.00
Jumlah	21,110,627	10,997,190	91.96

B.2 Belanja

*Realisasi Belanja
Negara
Rp22.090.007.028*

Realisasi Belanja instansi pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp22.090.007.028 atau 99,03% dari anggaran belanja sebesar Rp22.186.820.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
Periode 31 Desember 2023*

Uraian	31 DESEMBER 2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	12,224,466,000	12,177,398,518	99.61
Belanja Barang	7,464,262,000	7,430,135,425	99.54
Belanja Modal	2,498,092,000	2,482,473,085	99.37
Total Belanja Kotor	22,186,820,000	22,090,007,028	99.56
Jumlah	22,186,820,000	22,090,007,028	99.56

Dibandingkan dengan 31 Desember 2023, Realisasi 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 27,79% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan terdapatnya realisasi belanja pegawai sebesar Rp12.177.398.518, realisasi belanja barang sebesar Rp7.430.135.425 dan Belanja Modal Rp2.482.473.085.

*Perbandingan Realisasi Belanja
Periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2023	REALISASI 31 DESEMBER 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	12,177,398,518	11,465,225,921	6.21
Belanja Barang	7,430,135,425	6,379,288,850	16.47
Belanja Modal	2,482,473,085	0	0.00
Jumlah	22,090,007,028	17,844,514,771	23.79

*Belanja Pegawai
Rp12.177.398.518*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp12.177.398.518 dan Rp 11.465.225.921. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh

pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja pada 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 6,21% dari 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh :

1. Terdapat kenaikan pembayaran gaji PNS;
2. Bertambahnya jumlah pegawai yang berasal dari promosi dan mutasi;
3. Adanya perubahan jabatan pegawai dari JFU menjadi JFT sehingga mengakibatkan bertambahnya realisasi anggaran untuk tunjangan fungsional PNS;
4. Adanya pegawai yang masa jabatannya berakhir (pensiun).

*Perbandingan Belanja Pegawai
Periode 31 Desember 2023 dan 30 Desember 2022*

URAIAN	REALISASI		NAIK (TURUN) %
	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	12,080,721,529	11,361,618,869	6.33
Belanja Lembur	98,518,000	108,122,000	(8.88)
Jumlah Belanja Kotor	12,179,239,529	11,469,740,869	6.19
Pengembalian Belanja Pegawai	(1,841,011)	(4,514,948)	-
Jumlah Belanja	12,177,398,518	11,465,225,921	6.21

B.4 Belanja Barang

*Belanja Barang
Rp7.430.135.425*

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp7.430.135.425 dan Rp6.379.288.850. Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 16,47% dari Realisasi Belanja Barang periode 30 Desember 2022.

*Perbandingan Belanja Barang
Periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2023	REALISASI 31 DESEMBER 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	1,390,059,965	1,453,344,768	(4.35)
Belanja Barang Non Operasional	1,078,708,150	761,433,645	41.67
Belanja Jasa	1,781,653,749	1,615,320,179	10.30
Belanja Pemeliharaan	1,156,266,980	850,830,692	35.90
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1,970,443,281	1,572,888,532	25.28
Belanja Barang Persediaan	53,003,300	125,471,034	(57.76)
Jumlah Belanja Kotor	7,430,135,425	6,379,288,850	16.47
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	7,430,135,425	6,379,288,850	16.47

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Padang mengalokasikan belanja barang untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp54.345.000. Anggaran tersebut terserap sebesar Rp54.245.000 yang terdiri dari Belanja Barang Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19 berupa Pembelian lisensi aplikasi *zoom meeting*, *Tissue* kering dan *tissue* basah. Realisasi ini juga berasal dari Belanja Barang Non Operasional Penanganan Pandemi COVID-19 berupa Pembelian Multivitamin. Rincian belanja Penanganan COVID-19 dapat dilihat sebagai berikut:

AKUN	URAIAN AKUN	PAGU	REALISASI	PENYERAPAN
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1,345,000	1,245,000	99,82%
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	53,000,000	53,000,000	100%

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Persediaan

Persediaan
Rp20.347.808

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp20.347.808 dan Rp43.646.964.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan
Periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Jenis	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
Barang Konsumsi	20,347,808	43,646,964
Jumlah	20,347,808	43,646,964

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tanah
Rp84.712.482.000

C.2 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp84.712.482.000,- dan Rp24.327.802.000,-.

Rincian Saldo Tanah per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah Periode 30 Juni 2022

No	Uraian	Luas Tanah (m2)	Alamat	Nilai
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	504	JL. KEHAKIMAN NO.5 PADANG	724,828,000
2	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	2,222	JL. PADANG PASIR X	5,204,480,000
3	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	315	JL. JAKARTA	720,049,000
4	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	480	JL. ASRAMA HAJI	705,600,000
5	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	372	JL. BUNDA	432,813,000
6	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	640	JL. TEKNOLOGI VIII SITEBA	1,050,772,000
7	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	204	JL. WIRASAKTI KOMPI C SITEBA	317,179,000
8	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	500	JL. NGURAH RAI II NO. 1 AIR TAWAR	791,000,000
9	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	500	JL. NGURAH RAI II NO. 2 AIR TAWAR	791,000,000
10	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2,600	S. PARMAN NO.256+	6,095,700,000
11	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	1,850	Jl.Raya Bukittinggi-medan	233,294,000
12	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	1,079	Jl.Ke Talu	196,982,000
13	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	499	JL. IMAM BONJOL	298,913,000
14	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	320		343,571,000
15	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	1,250	JL. BATUSANGKAR-TABEK PATAH	1,342,075,000
16	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	605	JL. GAJAH MADA	327,895,000
17	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	320	JL PANTI - TALU	82,152,000
18	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	260	JLN KOTO KECIL	146,057,000
19	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	950	DEKAT KANTOR CAMAT	546,992,000
20	Tanah Rawa	3,015	-	3,976,450,000
21	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4,426	JLN. PERINTIS KEMERDEKAAN BUKITTINGGI	60,384,680,000
	Jumlah			84,712,482,000

*Peralatan dan Mesin
Rp12.684.489.226*

C.3 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp12.684.489.226 dan Rp10.494.079.704.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	10,494,079,704
Mutasi tambah:	
Pembelian	533,881,450
Transfer Masuk	2,562,518,495
Reklas Masuk	47,300,000
Mutasi kurang:	
Transfer Keluar	(1,456,000)
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	
Penghapusan	0
Reklas Keluar	(47,300,000)
Penghentian Aset dari Penggunaan	(904,534,423)
Saldo per 31 Desember 2023	12,684,489,226
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(10,301,799,146)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	2,382,690,080

Saldo Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp10.301.799.146 dan Rp9.531.692.202. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset peralatan dan mesin yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

*Gedung dan
Bangunan
Rp21.882.633.635*

C.4 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp21.882.633.635 dan Rp19.934.042.000. Rincian mutasi Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Gedung dan Bangunan TA 2023

No	Uraian	Luas Bangunan (m2)	Alamat	Nilai	Keterangan
1	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	4	JL. S. PARMAN NO 256 PADANG	6,961,000	POS SATPAM, PRAKIRAN, DAN GUDANG
2	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	150		743,667,000	MESJID KANWIL
3	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	350	JL. KEHAKIMAN NO 5 PADANG	745,943,000	RUMAH DINAS KAKANWIL
4	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	120	JL. PADANG PASIR X	527,520,595	RUMAH DINAS KADIV, ADMINISTRASI DAN PAGAR

5	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	140	JL. PADANG PASIR X	564,314,565	RUMAH DINAS KADIV PAS
6	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	120	UNP PADANG	255,752,000	-
7	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	70	JL. JAKARTA ASRATEK	492,719,000	-
8	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	70	ASRAMA HAJI	149,189,000	-
9	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	70	ASRAMA HAJI	149,189,000	-
10	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	70	JL. BUNDA V WISMA WARTA	149,189,000	-
11	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	70	PADANG PASIR X	402,456,103	RUMAH DINAS KADIN YANKUM
12	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	70	PADANG PASIR X	403,395,192	RUMAH DINAS KADIV IMIGRASI
13	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	50	PADANG PASIR X	149,189,000	-
14	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	50	PADANG PASIR X	102,617,000	-
15	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	70	JL. WIRA SAKTI SITEBA (DEPAN KOMPI C)	143,663,000	JL. WIRASAKTI SITEBA ASET SUDAH LAMA ADA
16	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	50	JL. TEKNOLOGI VIII SITEBA PADANG	106,563,000	RUMAH DINAS JL. TEKNOLOGI SITEBA
17	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	50	JL. TEKNOLOGI VIII PADANG	106,563,000	RUMAH DINAS JL. TEKNOLOGI SITEBA
18	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	50	JL. TEKNOLOGI VIII SITEBA PADANG	106,563,000	JL. TEKNOLOGI SITEBA
19	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	50	JL. TEKNOLOGI NO VIII PADANG	106,563,000	JL. TEKNOLOGI SITEBA
20	Rumah Negara Golongan I Tipe E Permanen	60	JL. S. PARMAN NO 256 PADANG	127,876,000	RUMAH DINAS JL.S PARMAN NO 256 PADANG
21	Bangunan Tempat Sidang/Zitting Plaat	250		662,061,000	MUO MA
22	Bangunan Tempat Sidang/Zitting Plaat	305		807,714,000	MOU MA
23	Bangunan Tempat Sidang/Zitting Plaat	250		670,605,000	MUO MA

24	Bangunan Tempat Sidang/Zitting Plaat	250		670,605,000	MUO MA
25	Bangunan Tempat Sidang/Zitting Plaat	250		670,605,000	MOU MA
26	Gedung Pos Jaga Permanen	20	S.PARMAN	27,204,000	KANWIL
27	Bangunan Gedung Kantor Permanen	600	S.PARMAN NO.256 PADANG	2,584,893,180	GEDUNG C KANWIL
29	Bangunan Gedung Kantor Permanen	510	S.PARMAN NO.256 PADANG	1,429,259,000	GEDUNG C KANWIL
30	Bangunan Gedung Kantor Permanen	537	S.PARMAN NO.256	1,621,153,000	GEDUNG C KANWIL
31	Bangunan Gedung Kantor Permanen	293	S.PARMAN NO.256 PADANG	821,123,000	GEDUNG C KANWIL
33	Bangunan Gedung Kantor Permanen	225	NIPAH NO. 50 PADANG	201,427,000	GEDUNG C KANWIL
34	Bangunan Gedung Kantor Permanen	240	DAERAH KANDI	887,448,000	LPKN SAWAHLUNTO
35	Bangunan Gedung Kantor Permanen	0	BUKITTINGG I	1,147,497,000	EX. LAPAS BUKITTINGGI
36	Pagar permanen			2,842,170,000	TEMBOK KELL RTN SWH LNT
37	Pagar permanen			1,149,304,000	TEMBOK KLL RUTAN TALU
38	Pagar permanen			49,891,000	PAGAR RD AIR TAWAR
39	Pagar permanen			49,891,000	PAGAR RD. S. PARMAN
40	Pagar permanen			49,891,000	PAGAR RD TABING
JUMLAH				21,882,633,635	

Terdapat aset tetap gedung dan bangunan pada aplikasi SAKTI modul Asset BMN Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat yang harus ditransfer ke Satuan Kerja, dengan rincian sebagai berikut :

1. Bangunan Gedung Kantor Permanen senilai Rp201.427.000 yang harus ditransfer ke Satuan Kerja Kantor Imigrasi Padang;
2. Bangunan Gedung kantor Permanen senilai Rp887.448.000 yang harus ditransfer ke LPKN Sawahlunto;
3. Pagar Permanen senilai Rp2.842.170.000 yang harus ditransfer ke Rutan Sawahlunto.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Saldo Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing Rp3.861.339.160 dan Rp2.512.679.740.

C.5 Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya
Rp139.012.928*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp139.012.928 dan Rp135.012.928. Nilai Aset tetap lainnya per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan dibandingkan dengan per 31 Desember 2022, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:



Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp2.810.836.950*

C.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.810.836.950 dan Rp2.810.836.950. KDP tersebut sudah diusulkan penghapusan ke Sekretariat Jenderal dan sedang menunggu persetujuan penghapusan.

Rincian KDP per 31 Desember 2023 sebagai berikut :

NO	NAMA KDP	NOMOR KONTRAK	NAMA KONTRAKTOR	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK	PEKERJAAN	SALDO KDP
1	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM Pengerjaan	W3.PL.02.01-146	PT. PROTEKNIKA JASA PRATAMA	2,323,000,000	24 November 2010	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 2 LANTAI LP WANITA PASAMAN (APBN-P) (100%)	2,323,000,000
2	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM Pengerjaan	W3.PL.02.01-73	CV. KORANA KARYA	213,709,000	30 Agustus 2010	PERENCANAAN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR LP WANITA PASAMAN (85%)	181,652,650
3	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM Pengerjaan	W3.PL.02.01-149	CV.KARYA CIPTA CONSULTANT	49,000,000	04 November 2010	PENGAWASAN GEDUNG KANTOR LP WANITA PASAMAN (55%)	26,950,000
4	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM Pengerjaan					BIAYA PENGELOLAAN ADMINISTRASI	28,434,300
5	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM Pengerjaan	W3.PL.02.04-114A	CV. KARYA ENGINEER	313,500,000	15 September 2010	PERENCANAAN PEMBANGUNAN BLOK HUNIAN 2 LANTAI (APBN-P) GEDUNG KHUSUS LP WANITA PASAMAN (85%)	250,800,000
TOTAL KDP							2,810,836,950

*Aset Lain-Lain
Rp887.749.700*

C.7 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp887.749.700 dan Rp140.903.000. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	140,903,000
Mutasi tambah:	
Reklas Masuk	904,909,423
Mutasi kurang:	
Penghapusan	158,062,723
Saldo per 31 Desember 2023	887,749,700
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	(887,749,700)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	0

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
(Rp887.749.700)*

C.8 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp887.749.700 dan Rp140.453.000. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Lain-lain	887,749,700	(887,749,700)	0
Jumlah	887,749,700	(887,749,700)	0

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp0*

C.9 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp30.642.048. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Nilai utang kepada Pihak Ketiga mengalami penurunan, akibat dari pembayaran dan penghapusan hutang.

*Ekuitas
Rp107.702.198.236*

C.10 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp107.702.198.236 dan Rp105.324.816.833. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

*Pendapatan PNPB
Rp15.739.741*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp15.739.741 dan Rp10.997.040. tersebut terdiri dari:

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
Periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	15,122,586	10,997,040	37.52
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	617,155	0	0.00
Jumlah	15,739,741	10,997,040	43.13

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan berasal dari pendapatan sewa rumah dinas dari transaksi sampai dengan 31 Desember 2023.

D.2 Beban Pegawai

*Beban Pegawai
Rp 12.177.398.518*

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp12.177.398.518 dan Rp11.465.225.921. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai
Periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	8,256,655,900	7,677,200,400	12.45
Beban Pembulatan Gaji PNS	133,301	120,245	10.86
Beban Tunj.Suami/Istri PNS	575,677,320	545,671,322	5.50
Beban Tunj. Anak PNS	172,513,478	162,713,544	6.02
Beban Tunj. Struktural PNS	437,095,000	440,170,000	(0.70)
Beban Tunj. Fungsional PNS	752,824,000	677,277,000	98.71
Beban Tunj. Pph PNS	34,573,430	34,307,038	0.78
Beban Tunj. Beras PNS	492,818,100	459,577,320	7.23
Beban Uang Makan PNS	1,167,336,000	1,183,127,000	(4.44)
Beban Tunj. Umum PNS	191,095,000	181,455,000	5.31
Beban Uang Lembur	98,518,000	108,122,000	(8.88)
Jumlah	12,179,239,529	11,469,740,869	6.19
Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	1,840,300	4,280,170	0.00
Pengembalian Beban uang makan	0	234,000	0.00
Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	711	778.00	0.00
Jumlah	12,177,398,518	11,465,225,921	6.21

Beban Persediaan
Rp76.302.456

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp76.302.456 dan Rp111.972.390. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan
Periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian Jenis Beban	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	Naik (Turun) %
Beban Persediaan Konsumsi	76,302,456	111,972,390	(31.86)
Jumlah Beban Persediaan	76,302,456	111,972,390	(31.86)

Beban Barang dan Jasa
Rp4.219.779.816

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp4.219.779.816 dan Rp3.860.740.640. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa
Periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	1,196,027,915	1,249,504,828	(4.28)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	952,000	2,127,500	(55.25)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	179,280,000	174,480,000	2.75
Beban Barang Operasional Lainnya	12,555,050	11,517,850	9.01
Beban Barang Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19	1,245,000	15,714,590	0.00
Beban Bahan	731,908,300	383,699,150	90.75
Beban Honor Output Kegiatan	38,400,000	39,200,000	(2.04)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	187,793,850	63,434,050	196.05
Beban Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19	53,000,000	275,100,445	0.00
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	67,606,000		
Beban Langganan Listrik	406,486,052	405,760,615	0.18
Beban Langganan Telepon	18,476,000	15,883,018	16.33
Beban Langganan Air	28,215,300	32,256,900	(12.53)
Beban Sewa	1,257,234,349	1,111,407,694	13.12
Beban Jasa Profesi	39,400,000	74,500,000	(47.11)
Beban Jasa Lainnya	1,200,000	5,000,000	(76.00)
Jumlah	4,219,779,816	3,859,586,640	9.33

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.156.266.980 dan Rp850.830.692. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban

Beban Pemeliharaan
Rp1.156.266.980

pemeliharaan untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Pemeliharaan
Periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

*Beban Perjalanan Dinas
Rp1.970.443.281*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.970.443.281 dan Rp1.543.548.532. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Perjalanan Dinas
Periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	1,450,943,281	1,054,604,532	37.58
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	174,540,000	32,200,000	442.05
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	131,180,000	69,165,000	89.66
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	213,780,000	387,579,000	(44.84)
Jumlah	1,970,443,281	1,543,548,532	27.66

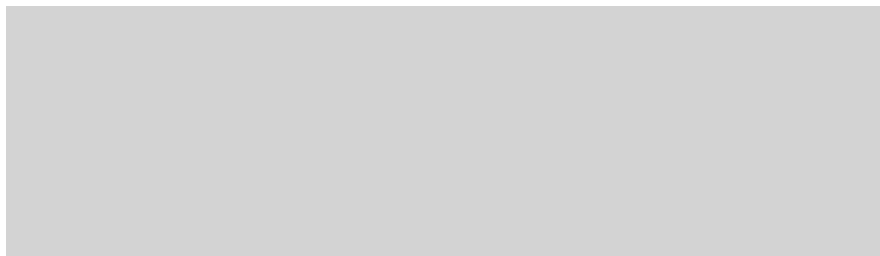
*Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp1.300.714.212*

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.300.714.212 dan Rp1.044.630.259. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan

dan Amortisasi untuk 31 Desember 2023 dan 30 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*



*Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp4.920.886*

D.8 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2023 berasal dari Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Yang Lalu sebesar Rp4.920.886. Perbandingan Surplus dari Kegiatan Non Operasional PER 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Kegiatan Non Operasional
Periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	NAIK (TURUN) %
Surplus Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	4,550,138	0	0.00
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainn	370,748	150	0.00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	4,920,886	150	3280490.67

**) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)*

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal
Rp105.324.816.833*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp105.324.816.833 dan Rp44.804.071.857.

*Defisit LO
(Rp20.880.244.636)*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar (Rp20.880.244.636) dan (Rp18.865.951.244). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Koreksi Aset Non Revaluasi
Rp3.547.500*

E.3 Koreksi Aset Non Revaluasi

Koreksi Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.547.500.

*Koreksi Aset Non Revaluasi Lainnya
Rp0*

E.3.1 Koreksi Aset Non Revaluasi Lainnya

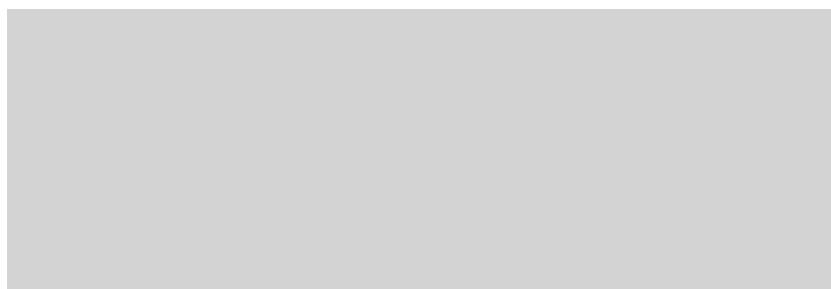
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp.11.006.000. Koreksi Lainnya terjadi akibat koreksi atas akun Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya.

*Transaksi Antar Entitas
Rp23.254.078.539*

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp23.254.078.539 dan Rp79.371.690.220. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

*Rincian Transaksi Antar Entitas
Periode 31 Desember 20223*



Rincian Transfer Masuk sampai dengan Periode 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

No	Satker Pengirim	Nama Satker Pengirim	Kode Akun	Nama Akun	Transfer Masuk
1	404233	Sekretariat Jenderal (Pusat)	132111	Peralatan dan Mesin	89,287,520
2	404233	Sekretariat Jenderal (Pusat)	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(16,768,000)
5	408793	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Padang	132111	Peralatan dan Mesin	1.306.090.675
6	408793	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Padang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.257.039.202)
7	408794	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Padang	132111	Peralatan dan Mesin	247,310,000
8	97102	Ditjen Kekayaan Intelektual	132111	Peralatan dan Mesin	908,035,300
9	97102	Ditjen Kekayaan Intelektual	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(106,054,780)
10	408799	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Padang	135121	Aset Tetap Lainnya	4,000,000
11	409288	Badan Pembinaan Hukun Nasional	132111	Peralatan dan Mesin	11,795,000
12	409288	Badan Pembinaan Hukun Nasional	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1,474,375)
JUMLAH					1,185,182,138

*Ekuitas Akhir
Rp107.702.198.236*

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp107.702.198.236 dan Rp105.324.816.833.

PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

- Pada Neraca AkruaI Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Padang (408798) terdapat akun Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi sebesar Rp3.547.500 akibat dari hasil reklasifikasi dari "Kamera Digital" ke "*Camera Digital*".
- Terdapat koreksi pencatatan nilai berkurang Gedung kantor permanen dengan nilai sebesar Rp11.169.592 atas temuan Inspektorat Jenderal Nomor: ITJ-KP.04.01-1645 tanggal 13 September 2023.

LAMPIRAN

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 013
ESELON I : SEKRETARIAT JENDERAL 01
SATUAN KERJA : KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PADANG 408798

Tgl Data : 25/01/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 25/01/24 9:21 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	22,186,820,000	22,090,007,028	(96,812,972)	100	18,024,531,000	17,844,514,771	(180,016,229)	99
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

PADANG, 25 Januari 2024
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

HARIS SUKAMTO
196606051989111001

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT
SATUAN KERJA : (408798) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PADANG

Tgl Data : 25/01/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 25/01/24 9:21 AM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	20,347,808	43,646,964	(23,299,156)	(53.38)
JUMLAH ASET LANCAR	20,347,808	43,646,964	(23,299,156)	(53.38)
ASET TETAP				
Tanah	84,712,482,000	84,712,482,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	12,684,489,226	10,494,079,704	2,190,409,522	20.87
Gedung dan Bangunan	21,882,633,635	19,934,042,000	1,948,591,635	9.78
Aset Tetap Lainnya	139,012,928	135,012,928	4,000,000	2.96
Konstruksi Dalam Pengerjaan	2,810,836,950	2,810,836,950	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(14,547,604,311)	(12,775,091,665)	(1,772,512,646)	13.87
JUMLAH ASET TETAP	107,681,850,428	105,311,361,917	2,370,488,511	2.25
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	887,749,700	140,903,000	746,846,700	530.04
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(887,749,700)	(140,453,000)	(747,296,700)	532.06
JUMLAH ASET LAINNYA	0	450,000	(450,000)	(100.00)
JUMLAH ASET	107,702,198,236	105,355,458,881	2,346,739,355	2.23
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	0	30,642,048	(30,642,048)	(100.00)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0	30,642,048	(30,642,048)	(100.00)
JUMLAH KEWAJIBAN	0	30,642,048	(30,642,048)	(100.00)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	107,702,198,236	105,324,816,833	2,377,381,403	2.26
JUMLAH EKUITAS	107,702,198,236	105,324,816,833	2,377,381,403	2.26
JUMLAH EKUITAS	107,702,198,236	105,324,816,833	2,377,381,403	2.26
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	107,702,198,236	105,355,458,881	2,346,739,355	2.23

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

PADANG, 25 Januari 2024
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

HARIS SUKAMTO
196606051989111001

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT

SATUAN KERJA : (408798) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PADANG

Tgl Data : 25/01/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 25/01/24 9:19 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	15,739,741	10,997,040	4,742,701	43.127
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	15,739,741	10,997,040	4,742,701	43.127
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	15,739,741	10,997,040	4,742,701	43.127
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	12,177,398,518	11,465,225,921	712,172,597	6.212
Beban Persediaan	76,302,456	111,972,390	(35,669,934)	(31.856)
Beban Barang dan Jasa	4,219,779,816	3,860,740,640	359,039,176	9.3
Beban Pemeliharaan	1,156,266,980	850,830,692	305,436,288	35.899
Beban Perjalanan Dinas	1,970,443,281	1,543,548,532	426,894,749	27.657
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT

SATUAN KERJA : (408798) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PADANG

Tgl Data : 25/01/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 25/01/24 9:19 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,300,714,212	1,044,630,259	256,083,953	24.514
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	20,900,905,263	18,876,948,434	2,023,956,829	10.722
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(20,885,165,522)	(18,865,951,394)	(2,019,214,128)	10.703
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	4,550,138	0	4,550,138	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	5,000,138	0	5,000,138	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	450,000	0	450,000	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	370,748	150	370,598	247,065 .333
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	370,748	150	370,598	247,065 .333
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	4,920,886	150	4,920,736	3,280,4 90.667
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(20,880,244,636)	(18,865,951,244)	(2,014,293,392)	10.677
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(20,880,244,636)	(18,865,951,244)	(2,014,293,392)	10.677

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

PADANG, 25 Januari 2024
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

HARIS SUKAMTO
196606051989111001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT

SATUAN KERJA : (408798) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PADANG

Tgl Data : 25/01/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 25/01/24 9:19 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	105,324,816,833	44,808,071,857	60,516,744,976	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(20,880,244,636)	(18,865,951,244)	(2,014,293,392)	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	3,547,500	11,006,000	(7,458,500)	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	3,547,500	0	3,547,500	-
LAIN-LAIN	0	11,006,000	(11,006,000)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	23,254,078,539	79,371,690,220	(56,117,611,681)	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	2,377,381,403	60,516,744,976	(58,139,363,573)	-
EKUITAS AKHIR	107,702,198,236	105,324,816,833	2,377,381,403	-

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

PADANG, 25 Januari 2024

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

HARIS SUKAMTO

196606051989111001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0800
SATUAN KERJA : 408798
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
SEKRETARIAT JENDERAL
SUMATERA BARAT
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PADANG

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 25/01/24 9:26 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
Tgl Data : 25/1/24 7:31 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	6,896,891,000	8,256,657,000	8,256,655,900	0	8,256,655,900	100	1,100
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	120,000	156,000	133,301	711	132,590	85.45	23,410
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	759,559,000	575,796,000	575,677,320	0	575,677,320	99.98	118,680
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	162,516,000	174,630,000	172,513,478	0	172,513,478	98.79	2,116,522
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	393,550,000	437,095,000	437,095,000	0	437,095,000	100	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	499,291,000	765,076,000	752,824,000	0	752,824,000	98.4	12,252,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	19,746,000	34,575,000	34,573,430	0	34,573,430	100	1,570
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	432,124,000	492,992,000	492,818,100	0	492,818,100	99.96	173,900
511129	Belanja Uang Makan PNS	1,308,780,000	1,180,588,000	1,167,336,000	0	1,167,336,000	98.88	13,252,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	177,870,000	192,150,000	191,095,000	1,840,300	189,254,700	99.45	2,895,300
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	10,650,447,000	12,109,715,000	12,080,721,529	1,841,011	12,078,880,518	99.76	30,834,482
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	114,751,000	114,751,000	98,518,000	0	98,518,000	85.85	16,233,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	114,751,000	114,751,000	98,518,000	0	98,518,000	85.85	16,233,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	10,765,198,000	12,224,466,000	12,179,239,529	1,841,011	12,177,398,518	99.63	47,067,482
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,280,300,000	1,196,623,000	1,196,027,915	0	1,196,027,915	99.95	595,085
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	12,000,000	2,000,000	952,000	0	952,000	47.6	1,048,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	171,600,000	179,280,000	179,280,000	0	179,280,000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	23,700,000	12,690,000	12,555,050	0	12,555,050	98.94	134,950
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	15,903,000	1,345,000	1,245,000	0	1,245,000	92.57	100,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	1,503,503,000	1,391,938,000	1,390,059,965	0	1,390,059,965	99.87	1,878,035
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	749,540,000	734,282,000	731,908,300	0	731,908,300	99.68	2,373,700
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	39,200,000	38,800,000	38,400,000	0	38,400,000	98.97	400,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	174,721,000	195,016,000	187,793,850	0	187,793,850	96.3	7,222,150
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	34,800,000	53,000,000	53,000,000	0	53,000,000	100	0
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	68,500,000	67,606,000	0	67,606,000	98.69	894,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	998,261,000	1,089,598,000	1,078,708,150	0	1,078,708,150	99	10,889,850
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	137,371,000	55,090,000	53,003,300	0	53,003,300	96.21	2,086,700

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0800
SATUAN KERJA : 408798
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
SEKRETARIAT JENDERAL
SUMATERA BARAT
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PADANG

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 25/01/24 9:26 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
Tgl Data : 25/1/24 7:31 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	22,000,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	159,371,000	55,090,000	53,003,300	0	53,003,300	96.21	2,086,700
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	348,000,000	444,000,000	437,128,100	0	437,128,100	98.45	6,871,900
522112	Belanja Langganan Telepon	18,000,000	18,480,000	18,476,000	0	18,476,000	99.98	4,000
522113	Belanja Langganan Air	24,000,000	28,800,000	28,215,300	0	28,215,300	97.97	584,700
522141	Belanja Sewa	815,500,000	1,258,040,000	1,257,234,349	0	1,257,234,349	99.94	805,651
522151	Belanja Jasa Profesi	18,800,000	41,250,000	39,400,000	0	39,400,000	95.52	1,850,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	14,400,000	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	100	0
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	37,000,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	1,275,700,000	1,791,770,000	1,781,653,749	0	1,781,653,749	99.44	10,116,251
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	336,120,000	436,500,000	436,368,150	0	436,368,150	99.97	131,850
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	547,820,000	720,204,000	719,898,830	0	719,898,830	99.96	305,170
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	883,940,000	1,156,704,000	1,156,266,980	0	1,156,266,980	99.96	437,020
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	1,114,366,000	1,458,492,000	1,450,943,281	0	1,450,943,281	99.48	7,548,719
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	261,900,000	175,400,000	174,540,000	0	174,540,000	99.51	860,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	214,090,000	213,780,000	0	213,780,000	99.86	310,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	131,180,000	131,180,000	0	131,180,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	1,376,266,000	1,979,162,000	1,970,443,281	0	1,970,443,281	99.56	8,718,719
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	6,197,041,000	7,464,262,000	7,430,135,425	0	7,430,135,425	99.54	34,126,575
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	533,955,000	533,955,000	533,881,450	0	533,881,450	99.99	73,550
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	533,955,000	533,955,000	533,881,450	0	533,881,450	99.99	73,550
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	1,964,137,000	1,959,761,227	11,169,592	1,948,591,635	99.78	15,545,365
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	0	1,964,137,000	1,959,761,227	11,169,592	1,948,591,635	99.78	15,545,365
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	533,955,000	2,498,092,000	2,493,642,677	11,169,592	2,482,473,085	99.82	15,618,915
	JUMLAH BELANJA	17,496,194,000	22,186,820,000	22,103,017,631	13,010,603	22,090,007,028	99.62	96,812,972

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0800
SATUAN KERJA : 408798
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
SEKRETARIAT JENDERAL
SUMATERA BARAT
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PADANG

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 25/01/24 9:24 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
Tgl Data : 25/1/24 7:31 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	6,896,891,000	8,256,657,000	8,256,655,900	0	8,256,655,900	100	1,100
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	120,000	156,000	133,301	711	132,590	85.45	23,410
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	759,559,000	575,796,000	575,677,320	0	575,677,320	99.98	118,680
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	162,516,000	174,630,000	172,513,478	0	172,513,478	98.79	2,116,522
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	393,550,000	437,095,000	437,095,000	0	437,095,000	100	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	499,291,000	765,076,000	752,824,000	0	752,824,000	98.4	12,252,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	19,746,000	34,575,000	34,573,430	0	34,573,430	100	1,570
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	432,124,000	492,992,000	492,818,100	0	492,818,100	99.96	173,900
511129	Belanja Uang Makan PNS	1,308,780,000	1,180,588,000	1,167,336,000	0	1,167,336,000	98.88	13,252,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	177,870,000	192,150,000	191,095,000	1,840,300	189,254,700	99.45	2,895,300
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	10,650,447,000	12,109,715,000	12,080,721,529	1,841,011	12,078,880,518	99.76	30,834,482
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	114,751,000	114,751,000	98,518,000	0	98,518,000	85.85	16,233,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	114,751,000	114,751,000	98,518,000	0	98,518,000	85.85	16,233,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	10,765,198,000	12,224,466,000	12,179,239,529	1,841,011	12,177,398,518	99.63	47,067,482
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,280,300,000	1,196,623,000	1,196,027,915	0	1,196,027,915	99.95	595,085
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	12,000,000	2,000,000	952,000	0	952,000	47.6	1,048,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	171,600,000	179,280,000	179,280,000	0	179,280,000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	23,700,000	12,690,000	12,555,050	0	12,555,050	98.94	134,950
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	15,903,000	1,345,000	1,245,000	0	1,245,000	92.57	100,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	1,503,503,000	1,391,938,000	1,390,059,965	0	1,390,059,965	99.87	1,878,035
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	749,540,000	734,282,000	731,908,300	0	731,908,300	99.68	2,373,700
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	39,200,000	38,800,000	38,400,000	0	38,400,000	98.97	400,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	174,721,000	195,016,000	187,793,850	0	187,793,850	96.3	7,222,150
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	34,800,000	53,000,000	53,000,000	0	53,000,000	100	0
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	68,500,000	67,606,000	0	67,606,000	98.69	894,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	998,261,000	1,089,598,000	1,078,708,150	0	1,078,708,150	99	10,889,850
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	137,371,000	55,090,000	53,003,300	0	53,003,300	96.21	2,086,700

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0800
SATUAN KERJA : 408798
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
SEKRETARIAT JENDERAL
SUMATERA BARAT
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PADANG

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 25/01/24 9:24 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
Tgl Data : 25/1/24 7:31 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	22,000,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	159,371,000	55,090,000	53,003,300	0	53,003,300	96.21	2,086,700
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	348,000,000	444,000,000	437,128,100	0	437,128,100	98.45	6,871,900
522112	Belanja Langganan Telepon	18,000,000	18,480,000	18,476,000	0	18,476,000	99.98	4,000
522113	Belanja Langganan Air	24,000,000	28,800,000	28,215,300	0	28,215,300	97.97	584,700
522141	Belanja Sewa	815,500,000	1,258,040,000	1,257,234,349	0	1,257,234,349	99.94	805,651
522151	Belanja Jasa Profesi	18,800,000	41,250,000	39,400,000	0	39,400,000	95.52	1,850,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	14,400,000	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	100	0
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	37,000,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	1,275,700,000	1,791,770,000	1,781,653,749	0	1,781,653,749	99.44	10,116,251
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	336,120,000	436,500,000	436,368,150	0	436,368,150	99.97	131,850
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	547,820,000	720,204,000	719,898,830	0	719,898,830	99.96	305,170
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	883,940,000	1,156,704,000	1,156,266,980	0	1,156,266,980	99.96	437,020
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	1,114,366,000	1,458,492,000	1,450,943,281	0	1,450,943,281	99.48	7,548,719
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	261,900,000	175,400,000	174,540,000	0	174,540,000	99.51	860,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	214,090,000	213,780,000	0	213,780,000	99.86	310,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	131,180,000	131,180,000	0	131,180,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	1,376,266,000	1,979,162,000	1,970,443,281	0	1,970,443,281	99.56	8,718,719
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	6,197,041,000	7,464,262,000	7,430,135,425	0	7,430,135,425	99.54	34,126,575
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	533,955,000	533,955,000	533,881,450	0	533,881,450	99.99	73,550
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	533,955,000	533,955,000	533,881,450	0	533,881,450	99.99	73,550
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	1,964,137,000	1,959,761,227	11,169,592	1,948,591,635	99.78	15,545,365
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	0	1,964,137,000	1,959,761,227	11,169,592	1,948,591,635	99.78	15,545,365
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	533,955,000	2,498,092,000	2,493,642,677	11,169,592	2,482,473,085	99.82	15,618,915
	JUMLAH BELANJA	17,496,194,000	22,186,820,000	22,103,017,631	13,010,603	22,090,007,028	99.62	96,812,972

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANGKA COVID-19
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : null
SATUAN KERJA : 408798
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
SEKRETARIAT JENDERAL
BA(013) ES1(01) SUMATERA BARAT
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PADANG

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 25/01/24 9:23 AM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_covid--rekon17
 Tgl Data : 20/5/19 12:00 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	15,903,000	1,345,000	1,245,000	0	1,245,000	92.57	100,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	15,903,000	1,345,000	1,245,000	0	1,245,000	92.57	100,000
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	34,800,000	53,000,000	53,000,000	0	53,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	34,800,000	53,000,000	53,000,000	0	53,000,000	100	0
5218	Belanja Barang Persediaan							
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	22,000,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	22,000,000	0	0	0	0	0	0
5221	Belanja Jasa							
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	37,000,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	37,000,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	109,703,000	54,345,000	54,245,000	0	54,245,000	99.82	100,000
	JUMLAH BELANJA	109,703,000	54,345,000	54,245,000	0	54,245,000	99.82	100,000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**
ESELON I : 01 **SEKRETARIAT JENDERAL**
WILAYAH/PROVINSI : 0800 **SUMATERA BARAT**
SATUAN KERJA : 408798 **KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PADANG**

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 25/01/24 9:25 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	5,000,138	0	5,000,138	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	15,122,586	0	15,122,586	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	0	20,122,724	0	20,122,724	
4258	Pendapatan Denda					
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	617,155	0	617,155	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258	0	617,155	0	617,155	
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	370,748	0	370,748	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	370,748	0	370,748	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	0	21,110,627	0	21,110,627	
	JUMLAH PENDAPATAN	0	21,110,627	0	21,110,627	

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2023 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
UNIT ORGANISASI : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0800
SATUAN KERJA : 408798

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
SEKRETARIAT JENDERAL
SUMATERA BARAT
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PADANG

Tgl. Cetak 25/01/2024 9:27 AM
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker --rekon17

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	43,646,964	0
0.0	131111	Tanah	84,712,482,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	10,494,079,704	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	19,934,042,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	135,012,928	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	2,810,836,950	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	9,531,692,202
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	3,232,924,463
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	10,475,000
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	140,903,000	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	140,453,000
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	30,642,048
0.0	391111	Ekuitas	0	105,324,816,833
JUMLAH			118,271,003,546	118,271,003,546

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT

SATUAN KERJA : (408798) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PADANG

Tgl Data : 31/01/24 12:00 AM

Tgl Cetak : 31/01/24 7:44 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	20,347,808	0
0.0	131111	Tanah	84,712,482,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	12,684,489,226	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	21,882,633,635	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	139,012,928	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	2,810,836,950	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	10,675,790,151
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	3,861,339,160
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	10,475,000
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	887,749,700	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	887,749,700
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	22,090,007,028
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	21,110,627	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	1,185,182,138
0.0	391111	Ekuitas	0	105,324,816,833
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	3,547,500
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	5,000,138
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	15,122,586
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	617,155
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	370,748
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	8,256,655,900	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	132,590	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	575,677,320	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	172,513,478	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	437,095,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	752,824,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	34,573,430	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	492,818,100	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	1,167,336,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	189,254,700	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	98,518,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	1,196,027,915	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	952,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	179,280,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	12,555,050	0
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1,245,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	731,908,300	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT

SATUAN KERJA : (408798) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PADANG

Tgl Data : 31/01/24 12:00 AM

Tgl Cetak : 31/01/24 7:44 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	38,400,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	187,793,850	0
3.0	521241	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	53,000,000	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	67,606,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	406,486,052	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	18,476,000	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	28,215,300	0
3.0	522141	Beban Sewa	1,257,234,349	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	39,400,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	1,200,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	436,368,150	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	719,898,830	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	1,450,943,281	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	174,540,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	213,780,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	131,180,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	672,299,515	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	628,414,697	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	76,302,456	0
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	450,000	0
JUMLAH			144,060,018,137	144,060,018,137

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

PADANG, 31 Januari 2024
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARANHARIS SUKAMTO
196606051989111001

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT

SATUAN KERJA : (408798) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PADANG

Tgl Data : 31/01/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 31/01/24 7:45 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	22,090,007,028
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	21,110,627	0
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	5,000,138
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	15,122,586
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	617,155
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	370,748
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	8,256,655,900	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	133,301	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	575,677,320	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	172,513,478	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	437,095,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	752,824,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	34,573,430	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	492,818,100	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	1,167,336,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	191,095,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	98,518,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,196,027,915	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	952,000	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	179,280,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	12,555,050	0
3.0	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1,245,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	731,908,300	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	38,400,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	187,793,850	0
3.0	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	53,000,000	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	67,606,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	53,003,300	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	437,128,100	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	18,476,000	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	28,215,300	0
3.0	522141	Belanja Sewa	1,257,234,349	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	39,400,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	1,200,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	436,368,150	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	719,898,830	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	1,450,943,281	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	174,540,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT

SATUAN KERJA : (408798) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PADANG

Tgl Data : 31/01/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 31/01/24 7:45 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	213,780,000	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	131,180,000	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	533,881,450	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	1,959,761,227	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	711
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	1,840,300
3.1	533121	Pengembalian Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	11,169,592
JUMLAH			22,124,128,258	22,124,128,258

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

PADANG, 31 Januari 2024

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

HARIS SUKAMTO

196606051989111001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT

SATUAN KERJA : (408798) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PADANG

Tgl Data : 25/05/23 6:00 PM

Tgl Cetak : 06/07/23 1:52 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	43,646,964	0
0.0	131111	Tanah	84,712,482,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	10,494,079,704	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	19,934,042,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	135,012,928	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	2,810,836,950	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	9,531,692,202
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	3,232,924,463
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	10,475,000
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	140,903,000	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	140,453,000
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	30,642,048
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	17,844,514,771
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	10,997,190	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	61,538,172,639
0.0	391111	Ekuitas	0	44,808,071,857
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	7,750,000
0.0	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	7,750,000	0
0.0	391119	Koreksi Lainnya	0	11,006,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	10,997,040
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	150
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	7,677,200,400	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	119,467	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	545,671,322	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	162,713,544	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	440,170,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	677,277,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	34,307,038	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	459,577,320	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	1,182,893,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	177,174,830	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	108,122,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	1,249,504,828	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,127,500	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	174,480,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	11,517,850	0
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	15,714,590	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT

SATUAN KERJA : (408798) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PADANG

Tgl Data : 25/05/23 6:00 PM

Tgl Cetak : 06/07/23 1:52 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521211	Beban Bahan	383,699,150	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	39,200,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	63,434,050	0
3.0	521241	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	275,100,445	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	405,760,615	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	15,883,018	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	32,256,900	0
3.0	522141	Beban Sewa	1,111,407,694	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	74,500,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	5,000,000	0
3.0	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	1,154,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	238,559,400	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	612,271,292	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	1,054,604,532	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	32,200,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	387,579,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	69,165,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	467,145,518	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	577,484,741	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	111,972,390	0
JUMLAH			137,166,699,170	137,166,699,170

Keterangan :

FINAL

PADANG, 6 Juli 2023
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARANHARIS SUKAMTO
196606051989111001

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UAKPB : 408798 KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PADANG

Tgl Data : 25/01/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 25/01/24 8:28 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_kel_satker

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
132111	Peralatan dan Mesin		351	152,882,100	(52,500,000)	(19,061,040)	0	(71,561,040)	81,321,060
30501	ALAT KANTOR	-	4	2,361,400	(411,400)	(195,000)	0	(606,400)	1,755,000
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	302	139,542,600	(42,364,550)	(18,364,420)	0	(60,728,970)	78,813,630
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	36	7,623,000	(7,623,000)	0	0	(7,623,000)	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	-	5	2,508,100	(1,254,050)	(501,620)	0	(1,755,670)	752,430
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	4	847,000	(847,000)	0	0	(847,000)	0
JUMLAH			351	152,882,100	(52,500,000)	(19,061,040)	0	(71,561,040)	81,321,060

Padang, 30 Juni 2023
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang

Haris Sukanto
196606051989111001

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UAKPB : 408798 KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PADANG

Tgl Data : 25/01/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 25/01/24 8:05 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kel_satker

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
131111	Tanah		22,911	84,712,482,000	0	0	0	0	84,712,482,000
20101	TANAH PERSIL	-	19,896	80,736,032,000	0	0	0	0	80,736,032,000
20102	TANAH NON PERSIL	-	3,015	3,976,450,000	0	0	0	0	3,976,450,000
132111	Peralatan dan Mesin		1,551	12,684,489,226	(9,531,692,202)	(1,144,097,949)	0	(10,675,790,151)	2,008,699,075
30103	ALAT BANTU	-	3	305,294,000	(305,294,000)	0	0	(305,294,000)	0
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	24	2,265,877,111	(3,126,178,811)	860,301,700	0	(2,265,877,111)	0
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	-	1	10,500,000	(10,500,000)	0	0	(10,500,000)	0
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	-	3	2,960,000	(2,960,000)	0	0	(2,960,000)	0
30303	ALAT UKUR	-	1	2,420,000	(2,420,000)	0	0	(2,420,000)	0
30401	ALAT PENGOLAHAN	-	5	8,298,400	(5,186,500)	(2,074,600)	0	(7,261,100)	1,037,300
30501	ALAT KANTOR	-	160	1,624,936,647	(505,648,978)	(1,098,545,089)	0	(1,604,194,067)	20,742,580
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	879	2,294,591,295	(1,574,855,490)	(196,427,710)	0	(1,771,283,200)	523,308,095
30601	ALAT STUDIO	-	23	674,696,535	(366,432,783)	(105,764,527)	0	(472,197,310)	202,499,225
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	72	248,231,665	(113,526,325)	(31,470,534)	0	(144,996,859)	103,234,806
30701	ALAT KEDOKTERAN	-	17	34,978,155	(27,450,968)	(5,494,875)	0	(32,945,843)	2,032,312
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	-	1	179,500,000	(56,093,750)	(22,437,500)	0	(78,531,250)	100,968,750
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	-	0	0	(17,737,500)	17,737,500	0	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	-	237	3,596,756,877	(2,186,494,496)	(479,680,901)	0	(2,666,175,397)	930,581,480
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	123	1,407,748,541	(1,203,212,601)	(80,241,413)	0	(1,283,454,014)	124,294,527
31503	ALAT SAR	-	1	23,500,000	(23,500,000)	0	0	(23,500,000)	0
31901	PERALATAN OLAH RAGA	-	1	4,200,000	(4,200,000)	0	0	(4,200,000)	0
133111	Gedung dan Bangunan		38	21,882,633,635	(3,232,924,463)	(628,414,697)	0	(3,861,339,160)	18,021,294,475
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	15	12,952,222,180	(2,251,288,450)	(431,179,590)	0	(2,682,468,040)	10,269,754,140
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	-	18	4,789,264,455	(451,954,421)	(100,929,363)	0	(552,883,784)	4,236,380,671
40401	TUGU/TANDA BATAS	-	5	4,141,147,000	(529,681,592)	(96,305,744)	0	(625,987,336)	3,515,159,664
135121	Aset Tetap Lainnya		1,118	139,012,928	(10,475,000)	0	0	(10,475,000)	128,537,928
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	-	1,116	124,302,928	0	0	0	0	124,302,928
60102	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	-	1	4,235,000	0	0	0	0	4,235,000
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	-	1	10,475,000	(10,475,000)	0	0	(10,475,000)	0
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan		22	887,749,700	(140,453,000)	(747,296,700)	0	(887,749,700)	0
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	8	879,761,700	(19,460,000)	(860,301,700)	0	(879,761,700)	0
30501	ALAT KANTOR	-	14	7,988,000	(24,109,000)	16,121,000	0	(7,988,000)	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	0	0	(1,523,000)	1,523,000	0	0	0
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	0	0	(103,000)	103,000	0	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	-	0	0	(95,258,000)	95,258,000	0	0	0
JUMLAH			25,640	120,306,367,489	(12,915,544,665)	(2,519,809,346)	0	(15,435,354,011)	104,871,013,478

Padang, 25 Januari 2024
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang

Haris Sukamto
196606051989111001

**LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
 POSISI PER TANGGAL 01 JANUARI 2023(SALDO AWAL)
 TAHUN ANGGARAN 2023**

UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UAKPB : 408798 KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PADANG

Tanggal : 25/01/24 1:31 PM
 Halaman : 1
 Kode Lap : lap_bmn_neraca_sawal_satker

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	43,646,964
131111	Tanah	84,712,482,000
132111	Peralatan dan Mesin	10,494,079,704
133111	Gedung dan Bangunan	19,934,042,000
135121	Aset Tetap Lainnya	135,012,928
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	2,810,836,950
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(9,531,692,202)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(3,232,924,463)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(10,475,000)
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	140,903,000
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(140,453,000)
J U M L A H		105,355,458,881

**LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2023
TAHUN ANGGARAN 2023**

UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UAKPB : 408798 KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PADANG

Tgl.Data : 25/01/24 6:00 AM
Tgl.Cetak : 25/01/24 8:39 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	20,347,808
131111	Tanah	84,712,482,000
132111	Peralatan dan Mesin	12,684,489,226
133111	Gedung dan Bangunan	21,882,633,635
135121	Aset Tetap Lainnya	139,012,928
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	2,810,836,950
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10,675,790,151)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(3,861,339,160)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(10,475,000)
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	887,749,700
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(887,749,700)
J U M L A H		107,702,198,236

Padang, 25 Januari 2024
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang

Haris Sukanto
196606051989111001

KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
SEMESTER II TA 2023

Kode dan Nama UAKPA : (408798) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA BARAT
 Kode dan Nama UAPPAW : (408798) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA BARAT
 Kode dan Nama Eselon 1 : (01) SEKRETARIAT JENDERRAL
 Kode dan Nama K/L : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Objek Penelaahan		Kondisi LK	Seharusnya	
<i>Beri tanda centang (√) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>				
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>				
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN				
	Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Pernyataan Tanggung Jawab	√		Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	√		Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	√		Ada
	Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Neraca Percobaan Akruwal Saldo Awal	√		Ada
2	Neraca Percobaan Akruwal	√		Ada
3	Neraca Percobaan Kas	√		Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	√		Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI				
	Kesesuaian Saldo	Sama	Tidak	Seharusnya
1.	Semua <i>face</i> laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	√		Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>				
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI				
	Persamaan Dasar Akuntansi	Sama	Tidak	Seharusnya
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	√		Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	√		Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	√		Sama
PENGECEKAN PADA MONSAKTI				
	To Do List	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		√	Tidak
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat		√	Ya
3	Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		√	Tidak
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		√	Tidak
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada,		√	Tidak
6	Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		√	Tidak
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		√	Tidak
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		√	Tidak
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan		√	Tidak
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan		√	Tidak
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		√	Tidak
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		√	Tidak
<i>Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah</i>				
	Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		√	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		√	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		√	Tidak
	a. Pagu/DIPA		√	Tidak

	b. Estimasi PNPB		√	Tidak
	c. Belanja		√	Tidak
	d. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	e. Pendapatan		√	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	g. Kas BLU		√	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		√	Tidak
	i. Kas Hibah		√	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		√	Tidak
	Rekon Internal	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		√	Tidak
	Daftar MONSAKTI	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di		√	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister)		√	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		√	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		√	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		√	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		√	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrual		√	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		√	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		√	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	√		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	√		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	√		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	√		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		√	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx		√	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka		√	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		√	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		√	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		√	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		√	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		√	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		√	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		√	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban		√	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		√	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang		√	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		N/A	Tidak

2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		N/A	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		N/A	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)			Tidak
	Terkait Satker BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada) Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah		N/A	Ada/Tidak
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu		N/A	Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam		√	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		√	Tidak
	Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke		N/A	Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di		N/A	Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		N/A	Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)		N/A	Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?		N/A	Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ? Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		N/A	Ya
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang		N/A	Ya
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI		0	
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)		-1185182138	
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu		√	Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		√	Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?		√	Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada		√	Ya
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		√	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk		√	Ya/Tidak
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		√	Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA				
	Pengecekan Pos-pos Neraca	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya		√	Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar		√	Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN		√	Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening		√	Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan		√	Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		√	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?		√	Ya

8	Terdapat saldo bernilai desimal		√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
	Pengecekan Pos-pos LO	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		√	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) , atau akun-		√	Tidak
3	Terdapat kodifikasi atau uraian akun null		√	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	√		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat	√		Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	√		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
	Pengecekan Pos-pos LPE	Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	√		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		√	Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek		√	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
	Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud? Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai	√		Ya
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas	√		Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
	Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		√	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		√	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		√	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		√	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)	√		Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)	√		Ya
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :		√	Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)		√	Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		√	Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		√	Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :		√	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		√	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	√		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)	√		Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	√		Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua?	√		Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?	√		Ya
	Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?		√	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas		√	Ya



2	Apakah ada Beban Bansos ?		√	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas		√	Ya
	Pengecekan Jurnal Manual Akrual pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrual		√	Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)	√		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrual	√		Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrual		√	Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)	√		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrual		√	Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrual		√	Ya/Tidak

TELAH LK BLU

LPSAL BLU		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?		N/A	Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?		N/A	Tidak
3	Apakah formula perhitugnan SAL pada LPSAL telah sesuai?		N/A	Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan		N/A	Ya
5	Apakah Nilai SILPA/SIKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA		N/A	Ya
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan		N/A	Ya
LAK BLU		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213		N/A	Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?		N/A	Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca		N/A	Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca		N/A	Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca		N/A	Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca		N/A	Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU		N/A	Ya

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk

<p>Mengetahui</p> <p>Pejabat Penyusun LKKL,</p>  <p>VINA SYAPRUDIN NIP. 19880215 201012 2 001</p>	<p>Padang, 19 Januari 2024</p> <p>Penelaah,</p>  <p>SIRTY YULISIA MOLINA NIP. 19890418 201901 2 001</p>
--	--

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Desember 2023

Kementerian/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI Tgl, No. SP : 30 November 2022 , DIPA-013.01.2.408798/2023

Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL Tahun : 2023

Provinsi/Kabupaten/Kota : (08.55) SUMATERA BARAT / KOTA PADANG KPPN : (010) Padang

Satuan Kerja : (408798) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PADANG

Alamat dan No Telp :

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00080/DRPP/408798/2023

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	BP Kas, BPP dan UM	240.000.000,00	2.343.131.741,00	2.583.131.741,00	0,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	240.000.000,00	2.343.131.741,00	2.583.131.741,00	0,00
	2. BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	BP Selain Kas	240.000.000,00	1.375.876.000,00	1.615.876.000,00	0,00
	1. BP UP*)	240.000.000,00	0,00	240.000.000,00	0,00
	2. BP TUP*)	0,00	1.375.876.000,00	1.375.876.000,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	0,00
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	0,00 (terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	0,00

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	0,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	0,00
3. Selisih Kas	Rp.	0,00

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	0,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
<hr/>		
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	0,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	0,00
<hr/>		
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	0,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
<hr/>		
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
<hr/>		
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	0,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	0,00
<hr/>		
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan UP (apabila ada)

- 1.
- 2.

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

HARIS SUKAMTO
NIP 196606051989111001

KOTA PADANG, Desember 2023
Bendahara Pengeluaran

NESSI MARETTI
III/a 198903032010122003



Mutasi Transaksi (01/12/2023 - 31/12/2023)

downloaded at 05/01/2024 10:19:29

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI (013)									
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI (01)									
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PADANG - 408798 (408798)									
Rekening Induk : RKK SETJEN KEMENKUMHAM OPS (913980083)									
Rekening Satker : BPG 010 KANWIL KUMHAM PADANG 408798 (9890854087981000)									
Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasi kasi
2023-12-29	14:47:06	990307	TRANSFER KE Setoran Pajak TRF TO:00000000612719588 PEMINDAHAN KE 612719588 Ibu NESSI MARETTI 9890854087981000 BPG 010 KANWIL KUMHAM PADANG 4087	Rp. 32,252,943	Rp. 32,252,943	-	Rp. 0	(TELLER)	(Empty)
2023-12-29	14:42:34	959627	TRANSFER KE Biaya Perbaikan Kendaraan Dinas Roda 2 TRF TO:000 PEMINDAHAN KE 612718619 Bpk ANDIWAN PUTRA 9890854087981000 BPG 010 KANWIL KUMHAM PADANG 4087	Rp. 33,102,943	Rp. 850,000	-	Rp. 32,252,943	(TELLER)	(Empty)
2023-12-29	14:42:33	959578	TRANSFER KE Pembayaran Kuitansi Buk Vina TRF TO:000000004327 PEMINDAHAN KE 432790337 Sdri VINA SYAFRUDIN 9890854087981000 BPG 010 KANWIL KUMHAM PADANG 4087	Rp. 275,594,943	Rp. 242,492,000	-	Rp. 33,102,943	(TELLER)	(Empty)
2023-12-29	14:42:33	959577	TRANSFER KE Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Fitr PEMINDAHAN KE 900696923 Ibu FITRIAHSANI K 9890854087981000 BPG 010 KANWIL KUMHAM PADANG 4087	Rp. 276,194,943	Rp. 600,000	-	Rp. 275,594,943	(TELLER)	(Empty)
2023-12-29	14:09:13	026650	TARIK TUNAI 1946810090000826 S1APDGA038 4148 9890854087981000 BPG 010 KANWIL KUMHAM PADANG 4087	Rp. 278,694,943	Rp. 2,500,000	-	Rp. 276,194,943	(TELLER)	(Empty)
2023-12-29	14:08:35	006228	TARIK TUNAI 1946810090000826 S1APDGA038 4147 9890854087981000 BPG 010 KANWIL KUMHAM PADANG 4087	Rp. 281,194,943	Rp. 2,500,000	-	Rp. 278,694,943	(TELLER)	(Empty)
2023-12-29	14:07:55	784175	TARIK TUNAI 1946810090000826 S1APDGA038 4146 9890854087981000 BPG 010 KANWIL KUMHAM PADANG 4087	Rp. 283,694,943	Rp. 2,500,000	-	Rp. 281,194,943	(TELLER)	(Empty)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI (013)

SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI (01)

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PADANG - 408798 (408798)

Rekening Induk : RKK SETJEN KEMENKUMHAM OPS (913980083)

Rekening Satker : BPG 010 KANWIL KUMHAM PADANG 408798 (9890854087981000)

Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasi kasi
2023-12-29	14:07:16	762817	TARIK TUNAI 1946810090000826 S1APDGA038 4145 9890854087981000 BPG 010 KANWIL KUMHAM PADANG 4087	Rp. 286,194,943	Rp. 2,500,000	-	Rp. 283,694,943	(TELLER)	(Empty)
2023-12-29	14:06:37	740740	TARIK TUNAI 1946810090000826 S1APDGA038 4144 9890854087981000 BPG 010 KANWIL KUMHAM PADANG 4087	Rp. 288,694,943	Rp. 2,500,000	-	Rp. 286,194,943	(TELLER)	(Empty)
2023-12-29	14:05:42	710583	TARIK TUNAI 1946810090000826 S1APDGA038 4143 9890854087981000 BPG 010 KANWIL KUMHAM PADANG 4087	Rp. 291,194,943	Rp. 2,500,000	-	Rp. 288,694,943	(TELLER)	(Empty)
2023-12-28	20:52:27	366022	TARIK TUNAI 1946810090000826 S1APDGA038 3829 9890854087981000 BPG 010 KANWIL KUMHAM PADANG 4087	Rp. 293,694,943	Rp. 2,500,000	-	Rp. 291,194,943	(TELLER)	(Empty)
2023-12-28	20:51:46	350482	TARIK TUNAI 1946810090000826 S1APDGA038 3828 9890854087981000 BPG 010 KANWIL KUMHAM PADANG 4087	Rp. 296,194,943	Rp. 2,500,000	-	Rp. 293,694,943	(TELLER)	(Empty)
2023-12-28	20:51:06	335580	TARIK TUNAI 1946810090000826 S1APDGA038 3827 9890854087981000 BPG 010 KANWIL KUMHAM PADANG 4087	Rp. 298,694,943	Rp. 2,500,000	-	Rp. 296,194,943	(TELLER)	(Empty)
2023-12-28	20:50:26	320458	TARIK TUNAI 1946810090000826 S1APDGA038 3826 9890854087981000 BPG 010 KANWIL KUMHAM PADANG 4087	Rp. 301,194,943	Rp. 2,500,000	-	Rp. 298,694,943	(TELLER)	(Empty)
2023-12-28	20:49:42	304117	TARIK TUNAI 1946810090000826 S1APDGA038 3825 9890854087981000 BPG 010 KANWIL KUMHAM PADANG 4087	Rp. 303,694,943	Rp. 2,500,000	-	Rp. 301,194,943	(TELLER)	(Empty)
2023-12-28	20:48:59	287721	TARIK TUNAI 1946810090000826 S1APDGA038 3824 9890854087981000 BPG 010 KANWIL KUMHAM PADANG 4087	Rp. 306,194,943	Rp. 2,500,000	-	Rp. 303,694,943	(TELLER)	(Empty)
2023-12-28	13:27:58	903234	TRANSFER KE Potongan Pajak TRF TO:00000000612719588 PEMINDAHAN KE 612719588 Ibu NESSI MARETTI 9890854087981000 BPG 010 KANWIL KUMHAM PADANG 4087	Rp. 306,380,227	Rp. 185,284	-	Rp. 306,194,943	(TELLER)	(Empty)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI (013)

SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI (01)

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PADANG - 408798 (408798)

Rekening Induk : RKK SETJEN KEMENKUMHAM OPS (913980083)

Rekening Satker : BPG 010 KANWIL KUMHAM PADANG 408798 (9890854087981000)

Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasi kasi
2023-12-28	12:49:37	959306	TRANSFER KE Pembayaran Kuitansi Instalasi Hall.Biaya Rapat di PEMINDAHAN KE 432790337 Sdri VINA SYAFRUDIN 9890854087981000 BPG 010 KANWIL KUMHAM PADANG 4087	Rp. 401,819,291	Rp. 95,439,064	-	Rp. 306,380,227	(TELLER)	(Empty)
2023-12-27	18:19:55	989678	TRANSFER KE Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Bagian Keuangan PEMINDAHAN KE 432790337 Sdri VINA SYAFRUDIN 9890854087981000 BPG 010 KANWIL KUMHAM PADANG 4087	Rp. 454,375,978	Rp. 52,556,687	-	Rp. 401,819,291	(TELLER)	(Empty)
2023-12-27	18:09:26	929503	TRANSFER KE Pembayaran Perjalanan Dinas Bagian Kepegawaian TR PEMINDAHAN KE 612719328 Ibu NANIK MARLINA SRI WENY 9890854087981000 BPG 010 KANWIL KUMHAM PADANG 4087	Rp. 492,615,978	Rp. 38,240,000	-	Rp. 454,375,978	(TELLER)	(Empty)
2023-12-27	18:09:25	929466	TRANSFER KE Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Bagian PPL TRF T PEMINDAHAN KE 900697348 Ibu LELLY KEMALA DEWI 9890854087981000 BPG 010 KANWIL KUMHAM PADANG 4087	Rp. 518,905,978	Rp. 26,290,000	-	Rp. 492,615,978	(TELLER)	(Empty)
2023-12-27	10:27:07	955119	TRANSFER KE Pembayaran Perjalanan Dinas ke Jakarta A.n Ramelan PEMINDAHAN KE 1373818093 Sdri HANA NOVIATNA 9890854087981000 BPG 010 KANWIL KUMHAM PADANG 4087	Rp. 522,955,978	Rp. 4,050,000	-	Rp. 518,905,978	(TELLER)	(Empty)
2023-12-27	09:54:21	970903	TRANSFER KE Pembayaran Pelunasan Perjalanan Dinas a.n Desmani PEMINDAHAN KE 1373818093 Sdri HANA NOVIATNA 9890854087981000 BPG 010 KANWIL KUMHAM PADANG 4087	Rp. 538,861,490	Rp. 15,905,512	-	Rp. 522,955,978	(TELLER)	(Empty)
2023-12-27	09:27:41	929925	TRANSFER KE Pembayaran Penginapan Kegiatan Penyusunan Rencana PEMINDAHAN KE 432790337 Sdri VINA SYAFRUDIN 9890854087981000 BPG 010 KANWIL KUMHAM PADANG 4087	Rp. 580,861,490	Rp. 42,000,000	-	Rp. 538,861,490	(TELLER)	(Empty)

Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasi kasi
2023-12-27	09:27:40	929888	TRANSFER KE Pembayaran Uang Harian Kegiatan Penyusunan Rencan PEMINDAHAN KE 900697348 Ibu LELLY KEMALA DEWI 9890854087981000 BPG 010 KANWIL KUMHAM PADANG 4087	Rp. 624,181,490	Rp. 43,320,000	-	Rp. 580,861,490	(TELLER)	(Empty)
2023-12-22	08:52:59	953614	TRANSFER KE Potongan Pajak TRF TO:00000000612719588 PEMINDAHAN KE 612719588 Ibu NESSI MARETTI 9890854087981000 BPG 010 KANWIL KUMHAM PADANG 4087	Rp. 626,704,090	Rp. 2,522,600	-	Rp. 624,181,490	(TELLER)	(Empty)
2023-12-22	08:52:58	953588	TRANSFER KE Pembayaran Transport wartawan TRF TO:00000000900 PEMINDAHAN KE 900696785 Bpk ANDRI ROSADI 9890854087981000 BPG 010 KANWIL KUMHAM PADANG 4087	Rp. 628,204,090	Rp. 1,500,000	-	Rp. 626,704,090	(TELLER)	(Empty)
2023-12-22	08:52:58	953584	TRANSFER KE Biaya Pembuatan Buletin Kehumasan TRF TO:00000000 PEMINDAHAN KE 900696785 Bpk ANDRI ROSADI 9890854087981000 BPG 010 KANWIL KUMHAM PADANG 4087	Rp. 645,681,490	Rp. 17,477,400	-	Rp. 628,204,090	(TELLER)	(Empty)
2023-12-21	11:01:24	362686	TARIK TUNAI 9890854087981000 BPG 010 KANWIL KUMHAM PADANG 4087	Rp. 974,257,490	Rp. 328,576,000	-	Rp. 645,681,490	(TELLER)	(Empty)
2023-12-20	10:22:21	936562	TRANSFER KE KARTU 6010047890933141 ONLINE 202312202153157445 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9890854087981000 BPG 010 KANWIL KUMHAM PADANG 4087	Rp. 992,107,490	Rp. 17,850,000	-	Rp. 974,257,490	(TELLER)	(Empty)
2023-12-20	09:13:26	961119	TRANSFER KE Pembayaran Sewa Bus TRF TO:00000000612718619 PEMINDAHAN KE 612718619 Bpk ANDIWAN PUTRA 9890854087981000 BPG 010 KANWIL KUMHAM PADANG 4087	Rp. 995,107,490	Rp. 3,000,000	-	Rp. 992,107,490	(TELLER)	(Empty)
2023-12-18	09:17:36	949458	TRANSFER KE Potongan Pajak TRF TO:00000000612719588 PEMINDAHAN KE 612719588 Ibu NESSI MARETTI 9890854087981000 BPG 010 KANWIL KUMHAM PADANG 4087	Rp. 1,014,663,182	Rp. 19,555,692	-	Rp. 995,107,490	(TELLER)	(Empty)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI (013)

SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI (01)

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PADANG - 408798 (408798)

Rekening Induk : RKK SETJEN KEMENKUMHAM OPS (913980083)

Rekening Satker : BPG 010 KANWIL KUMHAM PADANG 408798 (9890854087981000)

Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasi kasi
2023-12-18	09:17:35	949418	TRANSFER KE Pembayaran BBM Desember dan Jamuan Tamu TRF TO:00 PEMINDAHAN KE 900696286 Bpk HARTONAS 9890854087981000 BPG 010 KANWIL KUMHAM PADANG 4087	Rp. 1,016,960,282	Rp. 2,297,100	-	Rp. 1,014,663,182	(TELLER)	(Empty)
2023-12-18	08:33:39	946601	TRANSFER KE Pembayaran Perjalanan Dinas A.n Viko Pratama dkk PEMINDAHAN KE 612718766 Bpk VIKO PRATAMA 9890854087981000 BPG 010 KANWIL KUMHAM PADANG 4087	Rp. 1,031,683,254	Rp. 14,722,972	-	Rp. 1,016,960,282	(TELLER)	(Empty)
2023-12-18	08:33:39	946558	TRANSFER KE Pembayaran Kuitansi a.n Bapak Hasran Safawi TRF TO PEMINDAHAN KE 432790337 Sdri VINA SYAFRUDIN 9890854087981000 BPG 010 KANWIL KUMHAM PADANG 4087	Rp. 1,128,789,254	Rp. 97,106,000	-	Rp. 1,031,683,254	(TELLER)	(Empty)
2023-12-15	10:07:38	934329	TRANSFER KE Pembayaran Beli Baju Untuk kegiatan outbon TRF TO PEMINDAHAN KE 900696785 Bpk ANDRI ROSADI 9890854087981000 BPG 010 KANWIL KUMHAM PADANG 4087	Rp. 1,137,539,254	Rp. 8,750,000	-	Rp. 1,128,789,254	(TELLER)	(Empty)
2023-12-14	10:46:43	990814	TRANSFER KE KARTU 6010047890841975 ONLINE 202312144350994887 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9890854087981000 BPG 010 KANWIL KUMHAM PADANG 4087	Rp. 1,138,939,254	Rp. 1,400,000	-	Rp. 1,137,539,254	(TELLER)	(Empty)
2023-12-12	16:38:09	940651	TRANSFER KE Uang Muka Perjadi A.n Vina Syafrudin dkk ke Jakart PEMINDAHAN KE 432790337 Sdri VINA SYAFRUDIN 9890854087981000 BPG 010 KANWIL KUMHAM PADANG 4087	Rp. 1,168,939,254	Rp. 30,000,000	-	Rp. 1,138,939,254	(TELLER)	(Empty)
2023-12-08	10:36:40	902332	TRANSFER KE Pembayaran Biaya jamuan tamu dan pembeli an BBM Ke PEMINDAHAN KE 612718915 Ibu DESMANIAR 9890854087981000 BPG 010 KANWIL KUMHAM PADANG 4087	Rp. 1,171,807,354	Rp. 2,868,100	-	Rp. 1,168,939,254	(TELLER)	(Empty)
2023-12-08	10:36:40	902295	TRANSFER KE Pembayaran Uang Muka Perjadin a.n Desmaniar dkk T PEMINDAHAN KE 1373818093 Sdri HANA NOVIATNA 9890854087981000 BPG 010 KANWIL KUMHAM PADANG 4087	Rp. 1,189,807,354	Rp. 18,000,000	-	Rp. 1,171,807,354	(TELLER)	(Empty)

Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasi kasi
2023-12-08	10:36:40	902293	TRANSFER KE Pembelian BBM Kendaraan Dinas TRF TO:00000000900 PEMINDAHAN KE 900696286 Bpk HARTONAS 9890854087981000 BPG 010 KANWIL KUMHAM PADANG 4087	Rp. 1,191,107,354	Rp. 1,300,000	-	Rp. 1,189,807,354	(TELLER)	(Empty)
2023-12-08	09:52:06	053203	TARIK TUNAI 9890854087981000 BPG 010 KANWIL KUMHAM PADANG 4087	Rp. 1,391,107,354	Rp. 200,000,000	-	Rp. 1,191,107,354	(TELLER)	(Empty)
2023-12-07	16:32:02	983423	TRANSFER KE Pembelian Perlengkapan SAMAPTA TRF TO:0000000043 PEMINDAHAN KE 432790337 Sdri VINA SYAFRUDIN 9890854087981000 BPG 010 KANWIL KUMHAM PADANG 4087	Rp. 1,411,107,354	Rp. 20,000,000	-	Rp. 1,391,107,354	(TELLER)	(Empty)
2023-12-07	14:10:19	463787	TRANSFER DARI 0913980083 230101303008944000001 10130300894400000 PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI 9890854087981000 BPG 010 KANWIL KUMHAM PADANG 4087	Rp. 35,231,354	-	Rp. 1,375,876,000	Rp. 1,411,107,354	(SPAN)	(Empty)
2023-12-07	13:38:48	922664	TRANSFER KE Pembelian Kursi Futura TRF TO:00000000432790337 PEMINDAHAN KE 432790337 Sdri VINA SYAFRUDIN 9890854087981000 BPG 010 KANWIL KUMHAM PADANG 4087	Rp. 100,231,354	Rp. 65,000,000	-	Rp. 35,231,354	(TELLER)	(Empty)
2023-12-07	13:38:47	922621	TRANSFER KE Pembayaran Langganan Daya dan Jasa TRF TO:0000000 PEMINDAHAN KE 78420083 DIVRE 2 KP PADANG 9890854087981000 BPG 010 KANWIL KUMHAM PADANG 4087	Rp. 136,983,100	Rp. 36,751,746	-	Rp. 100,231,354	(TELLER)	(Empty)
2023-12-05	12:57:08	901075	TRANSFER KE Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Ke Jogja a.n Vik PEMINDAHAN KE 612718766 Bpk VIKO PRATAMA 9890854087981000 BPG 010 KANWIL KUMHAM PADANG 4087	Rp. 154,983,100	Rp. 18,000,000	-	Rp. 136,983,100	(TELLER)	(Empty)
2023-12-05	10:36:46	911786	TRANSFER KE Pembayaran Transport Wartawan TRF TO:00000000900 PEMINDAHAN KE 900696785 Bpk ANDRI ROSADI 9890854087981000 BPG 010 KANWIL KUMHAM PADANG 4087	Rp. 156,983,100	Rp. 2,000,000	-	Rp. 154,983,100	(TELLER)	(Empty)

Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasi kasi
2023-12-05	10:36:46	911780	TRANSFER KE Pembayaran Biaya Pembelian Google Drive TRF TO:00 PEMINDAHAN KE 612718880 Sdr FEBRYO FELIANDRA 9890854087981000 BPG 010 KANWIL KUMHAM PADANG 4087	Rp. 157,282,800	Rp. 299,700	-	Rp. 156,983,100	(TELLER)	(Empty)
2023-12-05	10:36:45	911735	TRANSFER KE Pembayaran Uang Muka Perjadin a.n Meri Mahera TRF PEMINDAHAN KE 900696616 Ibu MERY MAHERA 9890854087981000 BPG 010 KANWIL KUMHAM PADANG 4087	Rp. 161,060,800	Rp. 3,778,000	-	Rp. 157,282,800	(TELLER)	(Empty)
2023-12-05	10:36:45	911734	TRANSFER KE Pembayaran biaya pembuatan spanduk TRF TO:0000000 PEMINDAHAN KE 612718325 Bpk MAINOFRI 9890854087981000 BPG 010 KANWIL KUMHAM PADANG 4087	Rp. 173,283,300	Rp. 12,222,500	-	Rp. 161,060,800	(TELLER)	(Empty)
2023-12-01	06:56:32	917822	TRANSFER KE Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Ke Jogja a.n Ade PEMINDAHAN KE 900696650 Ibu ADEK PUTRI 9890854087981000 BPG 010 KANWIL KUMHAM PADANG 4087	Rp. 191,283,300	Rp. 18,000,000	-	Rp. 173,283,300	(TELLER)	(Empty)
2023-12-01	06:56:32	917791	TRANSFER KE Pembayaran uang Kegiatan Rakor Capaian Kinerja tg PEMINDAHAN KE 900697348 Ibu LELLY KEMALA DEWI 9890854087981000 BPG 010 KANWIL KUMHAM PADANG 4087	Rp. 212,923,300	Rp. 21,640,000	-	Rp. 191,283,300	(TELLER)	(Empty)
Total Mutasi					Rp. 1,588,799,300	Rp. 1,375,876,000	Rp. 0		

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : **(013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**
 Eselon I : **(01) SEKRETARIAT JENDERAL**
 Wilayah : **(0800) SUMATERA BARAT**
 Satuan Kerja : **(408798) KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM PADANG**
 No. Dokumen : **001**
 Tanggal : **2023-12-30**
 Tahun Anggaran : **2023**
 Keterangan : **JURNAL PENYESUAIAN KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVAL ATAS BELANJA
PENAMBAHAN NILAI GEDUNG BANGUNAN**

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

<input type="checkbox"/> Pendapatan Diterima Di Muka	<input type="checkbox"/> Piutang Jangka Panjang
<input type="checkbox"/> Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	<input type="checkbox"/> Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
<input type="checkbox"/> Belanja Dibayar Di Muka	<input type="checkbox"/> Piutang Jangka Pendek
<input type="checkbox"/> Belanja Yang Masih Harus Dibayar	<input type="checkbox"/> Transfer Masuk
<input type="checkbox"/> Penyisihan Piutang	<input type="checkbox"/> Transfer Keluar
<input type="checkbox"/> Penghapusan Piutang	<input type="checkbox"/> Koreksi Beban Aset
<input type="checkbox"/> Penyusutan Aset	<input type="checkbox"/> Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
<input type="checkbox"/> Kas Di Bendahara Penerimaan	<input type="checkbox"/> Kas Lainnya di BLU
<input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Pengeluaran	<input type="checkbox"/> Uang Muka Belanja
<input type="checkbox"/> Persediaan	<input type="checkbox"/> Perolehan Aset
<input type="checkbox"/> Koreksi Antar Beban	<input type="checkbox"/> Koreksi Piutang/Utang
<input type="checkbox"/> Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	<input type="checkbox"/> Hibah Langsung
<input type="checkbox"/> Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	<input checked="" type="checkbox"/> KOREKSI LAINNYA

JURNAL PENYESUAIAN :

NO	D/K	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	Belanja Penambahan nilai Gedung Bangunan (533121)	11,169,592	
	K	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi (391116)		11,169,592

Uraian :

Koreksi nilai aset tetap non revaluasi atas penambahan nilai gedung bangunan.

Dibuat oleh :
Kasubbag Pengelolaan Keuangan
dan BMN



Vina Syafrudin
NIP. 19880215 201012 2 001
Tanggal : 30 Desember 2023



Disetujui oleh :
KPA



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Haris Sukamto
NIP. 19660605 198911 1 001
Tanggal : 30 Desember 2023

Direkam oleh :
Operator GLP



Sirty Yulisia Molina
NIP. 19890418 201901 2 001
Tanggal : 30 Desember 2023

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : **(013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**
 Eselon I : **(01) SEKRETARIAT JENDERAL**
 Wilayah : **(0800) SUMATERA BARAT**
 Satuan Kerja : **(408798) KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM PADANG**
 No. Dokumen : **002**
 Tanggal : **2023-12-31**
 Tahun Anggaran : **2023**
 Keterangan : **JURNAL PENYESUAIAN KOREKSI BELANJA BARANG KEPERLUAN PERKANTORAN
 ATAS REALISASI BELANJA BARANG OPERASIONAL PENANGANAN PANDEMI COVID-19**

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

<input type="checkbox"/> Pendapatan Diterima Di Muka	<input type="checkbox"/> Piutang Jangka Panjang
<input type="checkbox"/> Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	<input type="checkbox"/> Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
<input type="checkbox"/> Belanja Dibayar Di Muka	<input type="checkbox"/> Piutang Jangka Pendek
<input type="checkbox"/> Belanja Yang Masih Harus Dibayar	<input type="checkbox"/> Transfer Masuk
<input type="checkbox"/> Penyisihan Piutang	<input type="checkbox"/> Transfer Keluar
<input type="checkbox"/> Penghapusan Piutang	<input type="checkbox"/> Koreksi Beban Aset
<input type="checkbox"/> Penyusutan Aset	<input type="checkbox"/> Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
<input type="checkbox"/> Kas Di Bendahara Penerimaan	<input type="checkbox"/> Kas Lainnya di BLU
<input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Pengeluaran	<input type="checkbox"/> Uang Muka Belanja
<input type="checkbox"/> Persediaan	<input type="checkbox"/> Perolehan Aset
<input type="checkbox"/> Koreksi Antar Beban	<input type="checkbox"/> Koreksi Piutang/Utang
<input type="checkbox"/> Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	<input type="checkbox"/> Hibah Langsung
<input type="checkbox"/> Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	<input checked="" type="checkbox"/> KOREKSI LAINNYA

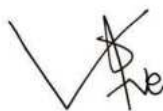
JURNAL PENYESUAIAN :

NO	D/K	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	Belanja Keperluan Perkantoran (521111)	13,718,100	
	K	Belanja Barang Operasional-Penanganan Pandemi COVID 19		13,718,100

Uraian :

Koreksi belanja barang keperluan perkantoran atas realisasi belanja barang operasional penanganan pandemi covid 19 yang telah dilakukan relat SPM.

Dibuat oleh :
Kasubbag Pengelolaan Keuangan dan BMN



Vina Syafrudin
NIP. 19880215 201012 2 001
Tanggal : 31 Desember 2023

Disetujui oleh :



Kepala KPA
 Haris Sukarno
 NIP. 19660605 198911 1 001
 Tanggal : 31 Desember 2023

Direkam oleh :
Operator GLP



Sirty Yulisia Molina
NIP. 19890418 201901 2 001
Tanggal : 31 Desember 2023